

# Optimalisasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah Di Bandar Lampung

**Erlina Rufaidah, Wan Abbas Zakaria, Yon Rizal**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Jl. Soemanti Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

\*Corresponding e-mail: atin\_lin@yahoo.com

*Received:*

*Accepted:*

*Published:*

**Abstract:** *The Optimization of School Committee in Developing School Cooperative in Bandar Lampung.* This study aimed to describe the role of the school committee in developing a school cooperative. In particular, this study aimed to describe the role of the school committee, the efforts of the committee in junior high school Bandar Lampung and to develop a schools cooperative partnership model and school committees. The focus of this research study was the role of the school committee to develop entrepreneurship through a cooperative effort of schools and school committees to establish a school cooperative. This study used qualitative research methods and used developmental research model. Data collection techniques used in this study were participant observation, documentation study and development models.

**Keywords:** *school committees, school cooperatives, entrepreneurship*

**Abstrak:** **Optimalisasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah di Bandar Lampung.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sekolah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah, usaha-usaha komite sekolah di SMP di Kota Bandar Lampung serta mengembangkan model kemitraan koperasi sekolah dan komite sekolah. Fokus penelitian penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam mengembangkan kewirausahaan melalui koperasi sekolah serta upaya komite sekolah dalam membangun koperasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan rancangan riset pengembangan model. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, studi dokumentasi dan pengembangan model.

**Kata kunci:** komite sekolah, koperasi sekolah, kewirausahaan

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Di antara faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk

kegiatan. Mulai bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Kedua unsu rini perlu melakukan kerjasama kolaboratif dalam

penyelenggaraan pendidikan. Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran salah satu peran komite sekolah dalam mewujudkan koperasi sekolah disekolah yaitu sebagai badan pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu bagaimana strategi mengelola lembaga sekolah dengan menggunakan konsep koperasi sekolah yang menguntungkan bagi sekolah dan siswa, dengan cara lebih mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.

Peranan komite sekolah dalam mengembangkan koperasi (kewirausahaan) juga merupakan bagian dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan MBS dapat diidentifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan penulis mengemukakan gejala problematis yang

terjadi pada komite sekolah dalam mengembangkan koperasi adalah komite sekolah sebagai unit kewirausahaan di sekolah kurang maksimal dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan mutu sekolah, usaha-usaha produksi komite sekolah kurang menggunakan partisipasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang berantusias dalam meningkatkan mutu sekolah, belum maksimal hubungan komite sekolah dengan pihak terkait (masyarakat dan wali siswa) dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap upaya komite sekolah mulai tumbuh karena adanya unit usaha-usaha pada level sekolah seperti koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Bahkan hal ini tidak hanya dilingkup sekolah saja, tetapi juga diperjualbelikan keluar sekolah. Hal inilah yang mewujudkan mutu sekolah yang semakin tahun semakin meningkat karena sebagian besar biaya operasional sekolah didapat dari koperasi sekolah.

Hasil dari unit usaha-usaha yang dibangun komite sekolah dari jaringan internal maupun jaringan eksternal yang di ikuti oleh partisipasi masyarakat diwujudkan sebagai peningkatan sumber daya seperti tenaga pendidik, tenaga non kependidikan, dan sarana prasarana seperti kelengkapan kelas mulai dari LCD, proyektor, AC, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian studi kasus tentang "Optimalisasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah di Bandar Lampung". Masalah dalam penelitian ini mengenai, peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung selanjutnya masalah tersebut menjadi sebuah fokus masalah yaitu sebagai berikut: 1) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah; 2) Peran komite sekolah; 3) Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta model kemitraan yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas yang dengan memperpanjang masa penelitian (observasi), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan, triangulasi dan *Membercheks*.

## Komite Sekolah

### 1. Pengertian komite sekolah

Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002 meskipun fungsinya yang secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu sebelumnya. Pembentukan komite sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun

program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

### 2. Fungsi dan peran komite sekolah

Komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/duniausaha/organisasi/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalangan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah sudah di jelaskan diatas tidak terkecuali peran komite sekolah juga merupakan sinergi untuk meningkatkan mutu sekolah. Lembaga komite sekolah inimemiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 56 ayat 3.

Peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi denganguru maupun dengan pihak terkait (masyarakat) sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah melalui usaha-usaha yang di laksanakan komite

sekolah. Menurut Hasbullah (2010:92) “secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah**

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tuadan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah.”Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama” (Hasbullah 2010:93).

### **4. Hubungan Sekolah dan Masyarakat**

Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Oemi Abdurrachman (Suryosubroto, 2004:155) ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good will*, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Ibnoe Syamsi (Suryosubroto, 2004:155) “hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan penerangan yang lengkap dan

obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya”. Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta model kemitraan yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas yang dengan memperpanjang masa penelitian (observasi), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan triangulasi dan *Membercheks*.

### **Komite Sekolah**

#### **1. Pengertian komite sekolah**

Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002 meskipun fungsinya yang secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu sebelumnya. Pembentukan komite sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan pasal 56 Undang undang Sistem Pendidikan

Nasional 2003, di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasamayang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

## **2. Fungsi dan peran komite sekolah**

Komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/duniasusaha/organisasi/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalangdan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah sudah di jelaskan diatas tidak terkecuali peran komite sekolah juga merupakan sinergi untuk meningkatkan mutu sekolah. Lembaga komite sekolah ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya

dalam Pasal 56 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 56 ayat 3.

Peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi dengan guru maupun dengan pihak terkait (masyarakat) sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah melalui usaha-usaha yang di laksanakan komite sekolah. Menurut Hasbullah (2010:92) “secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolahatau komite madrasah, yang berperansebagai berikut. Komite sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan padatingkat satuan pendidikan.

## **3. Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah**

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tuadan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagipeserta didik dan warga sekolah.”Itulah sebabnya maka paradigm MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama” (Hasbullah 2010:93).

## **4. Hubungan Sekolah dan Masyarakat**

Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Oemi Abdurrachman (Suryosubroto, 2004:155) ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good*

*will*, kepercayaan, penghargaan dari public sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Ibnu Syamsi (Suryosubroto, 2004:155) “hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya”. Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah.

Temuan peneliti, komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah awalnya dari kinerja komite sekolah yang melibatkan otonomi sekolah, seperti komite sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah yaitu membangun unit usaha yang berbagai macam unit usaha untuk meningkatkan mutu sekolah diantaranya unit usaha komite sekolah yaitu: koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam/konveksi mikro, sablon, percetakan/*offset* dan lain-lain

1. Unit usaha koperasi simpan pinjam adalah unit usaha yang dibangun komite sekolah. Unit usaha ini dapat mengakomodir beberapa keperluan warga sekolah, bahkan bisa dari luar dengan ketentuan tertentu. Laba dari unit usaha digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
2. Unit usaha penyediaan ATK, adalah unit usaha komite sekolah yang dipasarkan di sekolah yang membutuhkan. Laba unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah.
3. Unit usaha konveksi mikro yang dibangun komite sekolah dipasarkan ke toko-toko

diluar sekolah, karena unit usahaini banyak manfaatnya, laba dari unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk kegiatan sekolah.

4. Unit usaha percetakan merupakan unit usaha yang dibangun koperasi sekolah dan dikelola oleh anggota komite sekolah dan sebagai tenaga pendidik. Unit koperasi sekolah ini memberi pelayanan siswa dan tenaga pendidik, buku paket, lembar kerja siswa dikelola oleh koperasi sekolah. Laba unit usaha koperasi sekolah tidak seperti unit usaha lain, usaha koperasi mengambil laba yang sedikit, sehingga laba dari unit usaha koperasi sekolah sebagai tambahan dana kegiatan sekolah.

Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai dua sasaran pokok bagi sekolah sendiri dan siswa SMP di kota Bandar Lampung. Bagi sekolah dari laba usaha atau produksi digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dan bagi siswa untuk lapangan praktek karena sesuai dengan sekolah kejuruan, sehingga praktek lapangan bisa dilakukan di lingkup sekolah. Ini sejalan oleh Depdiknas (1998:5) dalam buku “pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah di sekolah” sebagai berikut. Dalam rangka menumbuhkan koperasi sekolah pada lembaga sekolah hendaknya diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu siswa dan lembaga sekolah. Pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler, yang dapat dimanfaatkan di masyarakat kelak. Sedangkan pengembangan koperasi sekolah bagi lembaga sekolah dapat ditempuh dengan mendirikan badan usaha yang menghasilkan laba (*profit taking*), yang dapat digunakan untuk menunjang biaya proses pendidikan. Melalui cara tersebut, diharapkan lembaga sekolah lebih bergairah dan produktif, menyejahterakan civitas

sekolah, serta siswa memiliki bekal kecakapan hidup (*life skills*).

Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi, peneliti berpendapat untuk langkah kedepan dalam pengembangan unit koperasi sekolah yang dibangun oleh komite sekolah adalah; (a) komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harusnya juga melibatkan siswa, seperti unit usaha yang di miliki mengarah pada kejuruan yang ada sehingga siswa-siswi SMP di kota Bandar Lampung ikut andil di usaha-usaha yang dibangun komite sekolah, sebagai contoh untuk lapangan praktik bagi siswa agar menciptakan jiwa kewirausahaan sekolah bagi siswa-siswi, (b) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harus pandai memanfaatkan peluang, mencari potensi baik itu sumber daya manusia maupun tempat. Depdiknas (1998:5) dalam buku “pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah” menjelaskan bahwa. Potensi-potensi tersebut kemudian dianalisis dengan cermat, sehingga dapat dipilih jenis usaha produksi/jasa yang paling tepat yang dipercaya efektif dan berkembang ke depan, serta menentukan tindakan yang tepat untuk mengimplementasikannya.

### **B. Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan temuan penelitian peran komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini kurang maksimal sehingga terjadi kendala-kendala indikator peran komite tidak maksimal, karena komite sekolah disini hanya berkecenderungan pada indikator peran komite sekolah sebagai badan pendukung, seperti yang diungkapkan oleh kepala komite sekolah komite sekolah di SMP ini, itu sudah berjalan dengan semestinya tapi masih kurang maksimal dari keempat peran komite sekolah yang semestinya sebagai berikut.

1. Peran pertama sebagai pertimbangan, disini komite SMP di kota Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah

memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, mendirikan musholah dan rencana pembangunan laboratorium media komputer. Selain itu, komite mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

2. Peran kedua pendukung ini merupakan keaktifan dari komite sekolah wujudnya seperti membangun unit usahayang dibangun oleh komite sekolah, merupakan dukungan finansial, tenaga, dan pikiran. Pikiran yang diberikan komite sekolah, seperti adanya unit usaha sebagai peningkatan mutu sekolah. Unit usaha komite sekolah ini digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, sebagai biaya kegiatan sekolah. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini juga melihat anggaran sekolah karena sebageaian besar dana diperoleh dari unit usaha komite sekolah. Ini sejalan dengan indicator peran komite sekolah sebagai pendukung.
3. Peran sebagai pengontrol, setiap satu bulan sekali selalu rapat, laporan perkembangan sekolah, perkembangan sekolahini meliputi tenaga pendidik, sarana prasarana, keadaan siswa dan perkembangan usaha, dan laporannya itu berupa LPJ.
4. Peran sebagai mediator, pemerintah, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, menampung aspirasi-aspirasinya beliau, sebagai masukan pendapat dari mereka semua itu untuk pembenahan menuju sekolah yang bermutu. Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Ini sejalan dengan Ace Suryani dan Dasim Budimansyah (dalam Hasbullah, 2010:96) dari aspek manajemen pendidikan, perencanaan, pelaksanaan program dan pengelolaan program. Dari indikator kinerja menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah, mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber-sumberdaya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan bantuan masyarakat Komite sekolah diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional No.044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat

dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Komite sekolah ini sangat mendorong tumbuhnya perhatian kepada masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ dunia usaha atau organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dan masyarakat dalam rangkap embiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

### **C. Upaya Komite Sekolah dalam Mengembangkan koperasi**

Berdasarkan temuan penelitian upaya yang dilakukan oleh SMP di kota Bandar Lampung adalah temuan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan melibatkan masyarakat sebagai pekerja unit usaha komite sekolah, mendirikan paguyuban wali murid dengan pengembangan unit usaha. Menurut Hasbullah (2010:93) "Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas". Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina

kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam wujud komite sekolah mengembangkan koperasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah.

Oleh karena itu komite sekolah SMP di kota Bandar Lampung ini sejalan dengan teori Hasbullah. Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan komite mengembangkan koperasi untuk meningkatkan mutu sekolah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”.

Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan

salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah, bahwa dalam meningkatkan mutu sekolah atau penyelenggaraan pendidikan melalui upaya yang dibangun komite sekolah melibatkan orangtua siswa dan masyarakat dengan mempromosikan unit usaha komite sekolah. Sehingga komite sekolah tidak hanya semata-mata sebagaimana komite sekolah semata. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Mulyasa (2006: 50) menyatakan “hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah”.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertutup telah ditinggalkan, keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh para guru.

Pengertian hubungan masyarakat di atas, sedikitnya ada dua kepentingan dalam manajemen pendidikan. Pertama, kepentingan sekolah, yang dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga masyarakat membantu kopini tersendiri terhadap

sekolah. Kepentingan lain agar sekolah dapat mengerti berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha pendidikan pada umumnya. Kedua, dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maka masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Pengertian, penerimaan dan pemahaman masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat terhadap sekolah.

Berdasarkan temuan peneliti berpendapat upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sudah sejalan dengan teori diatas hubungan masyarakat terhadap sekolah sangat terjalin baik, karena partisipasi masyarakat, orang tua siswa, hubungan masyarakat diwujudkan dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan mutu sekolah. Akan tetapi peneliti menyarankan untuk membangun usaha juga melibatkan para siswa yang sesuai bidang kejuruannya.

Adapun manfaat koperasi sekolah bagi siswa yang telah dijelaskan menurut Depdiknas, (2001:4-5) menjelaskan sebagai berikut. Pengembangan koperasi sekolah sekolah juga diharapkan memberikan keuntungan kepada siswa, dimana dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah dan manajerial tingkat sederhana untuk mengelola dan memasarkan suatu produk, dalam bentuk kurikuler, dan ekstrakurikuler.

Agar lebih efektif, mahasiswa juga hendaknya terlibat aktif terlibat secara langsung dalam pengembangan unit produksi/jasa sekolah atau, bekerja sama dengan instansi mitra lain terkait melalui program pendidikan sistem ganda atau *dual system education*. Melalui pola ini, selain siswa dapat mempraktekkan pendidikan dan pelatihan teoritis terhadap dunia nyata sebenarnya, juga dapat menemukan kendala

serta peluang dan atau menemukan ide-ide usaha baru yang lebih baik ke depan.

Menurut Depdiknas (2001:9) menjelaskan sebagai berikut. Pada akhirnya nanti, jika mereka lulus atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi memiliki alternatif-alternatif dalam meniti masa depannya, terutama mampu menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai kondisi lingkungan fisik dan sosio-budaya di masyarakatnya. Sehingga, pada diri siswa akan tertanam minat dan kemampuan untuk berpartisipasi membangun secara nyata daerah atau lingkungannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai unit usaha yang berbagai macam unit usaha untuk meningkatkan mutu sekolah. Diantaranya unit koperasi sekolah yang dibangun komite sekolah yaitu, unit koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Peran komite sekolah dalam menjalankan indikator kinerja komite sekolah, ada empat peran komite sekolah yaitu sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator.

Dari keempat peran komite sekolah tersebut, perlu adaperan perlakuan khusus terhadap komite sekolah yang kurang maksimal dan dianggap peran yang paling mudah atau diremehkan oleh komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung. Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi yaitu melibatkan partisipasi kepala sekolah, partisipasi tenaga pendidik, partisipasi orang tua siswa, dan masyarakat, mendirikan paguyuban wali murid, dan menyebarkan promosi dengan media massa

seperti *brosur dan spanduk*, mengadakan kerjasama dengan unit usaha luar. Kedepan, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dibidang yang sama tentang peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi, dengan melibatkan partisipasi orang tua siswa dan partisipasi masyarakat sehingga antarakomite sekolah dan hubungan masyarakat berperan dalam mewujudkan mutu sekolah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Peneitian*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwin. 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: ALFABETA.
- Depdiknas. 1998. *Koperasi sekolah (Enterpreneurship) dalam Pendidikan: Materi Pelatihan Calon Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2001. *Pedoman Pembinaan Pengembangan Koperasi sekolah Siswa SMK*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995. *Tentang Gerakan Nasional dan Membudayakan Koperasi Sekolah*. Jakarta. [http://Inpres\\_1995\\_004](http://Inpres_1995_004) Kewirausahaan.go.id/pdf di akses 20 Agustus 2015
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002. *Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. Jakarta. <http://kepmendiknas-004-tahun2002.go.id/pdf> di akses 20 Agustus 2015
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursidi, Ali. 2010. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Tarbiyah IAIN.
- Rohmah, Nailur. 2010. *Peran Komite Sekolah dalam Memngkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Timprimapena. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Jakarta: Cemerlang.
- Zimmerer, Thomas W, Norman M. Scarborough, dkk. 2008. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Koperasi sekolah dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta. Salemba Empat.
- Zunaidi, Arif. 2009. *Peranan Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Ngebruk Sumber Pucung Malang pada Manajemen Berbasis Sekolah*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.